

**RILIS**  
**KUNJUNGAN KERJA (KUNKER) SPESIFIK KOMISI I DPR RI**  
**KE JAWA BARAT (BOGOR)**  
**11 – 13 DESEMBER 2018**

---

Komisi I DPR RI melaksanakan Kunker Spesifik ke Bogor, Jawa Barat pada tanggal 11 – 13 Desember 2018. Kunker Spesifik dilaksanakan dalam rangka mengetahui peran dan capaian IPSC (*Indonesia Peace and Security Center*) dalam penguatan misi perdamaian serta dukungan kesiapan sarana-prasarananya.

Kunker Spesifik Komisi I DPR RI ke Bogor, Jawa Barat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi I DPR RI, mayjen TNI (Purn) Asril Hamzah Tanjung, S.I.P., dan diikuti oleh beberapa Anggota Komisi I DPR RI dari berbagai Fraksi.

Dalam Kunker Spesifik Komisi I DPR RI ke Kalimantan Selatan, Tim Kunker Spesifik Komisi I DPR RI melaksanakan kunjungan ke Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP) TNI. Dalam kunjungan tersebut, Tim Kunker mendapatkan penjelasan bahwa:

- a. Indonesia saat ini berada di peringkat 9 dunia sebagai negara yang mengirim pasukan perdamaian di dunia.
- b. Dalam tugas perdamaian dunia, Indonesia telah mengembangkan konsep dari *peacekeeping* menjadi *peacebuilding*, artinya, tidak hanya menjaga perdamaian, tetapi juga membangun perdamaian. *Peacekeeper* Indonesia telah lama diakui oleh PBB. Untuk itu PMPP patut didukung dan disosialisasikan agar memiliki dampak dan imbas secara lebih besar di level internasional. Upaya kampanye harus digalakkan untuk menggambarkan kebesaran institusi PMPP di dunia.
- c. Pola karir terhadap anggota TNI yang menjadi pasukan PBB memiliki pola sama seperti pasukan yang lainnya. Penilaian pangkat mempertimbangkan sistem pembinaan personel. Selain itu penempatan personel yang berkaitan dengan pangkat disesuaikan dengan kebutuhan. Pasukan *peacekeeper* memiliki tanda kehormatan sendiri dan bisa diusulkan dalam pembobotan kenaikan pangkat. Peraturan Panglima TNI menjadi panduan pola karir bagi pasukan TNI, baik yang mendapat tugas di PMPP TNI maupun satuan lainnya.
- d. Pola rekrutmen Calon Pasukan Perdamaian PBB, proses seleksi dilakukan mulai dari batalyon masing-masing. Untuk persyaratan calon pasukan ditentukan oleh PMPP TNI. Setiap proses seleksi, PMPP TNI melakukan inspeksi. Salah satu titik tekan dari proses seleksi ini adalah melakukan perubahan dari kombatan menjadi *peacekeeper/peacebuilding*. Dengan demikian, basic calon pasukan perdamaian adalah tetap kombatan karena basic troopnya adalah perang sebab pasukan UN tidak selalu hanya dalam kondisi damai, tetapi harus siap pada saat terjadi perang.
- e. Pada saat pelaksanaan tugas, posisi kepangkatan seseorang sering menjadi masalah, karena itu sistem pembinaan kepangkatan di TNI perlu memperhatikan kebutuhan pasukan yang dikirim dalam misi perdamaian PBB.
- f. Perlu *political will* secara menyeluruh terkait Pasukan wanita TNI. Mandat PBB adalah 15%, namun hal ini tidak bisa terpenuhi karena berbagai faktor, meski di Indonesia ada aturan 30% kuota perempuan.
- g. Selain peran pokoknya, PMPP TNI melakukan pendidikan terhadap para wartawan agar wartawan lebih mengenal dekat dengan situasi perang dan memberikan informasi dengan tujuan misi damai. Untuk itu, PMPP bekerjasama dengan Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI).

Bogor, 13 Oktober 2018

Tim Kunker Spesifik Komisi I DPR RI ke Jawa Barat